

PENGEMBANGAN MODEL PEMBERDAYAAN BAGI PENGOLAH IKAN GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN (Studi Kasus Pada Pengolah Ikan Di Kabupaten Cilacap)

Oleh:

Christiawan Hendratmoko
Budi Istiyanto
Ida Ayu Kade Rachmawati Kusasih

hendratmokochristiawan@yahoo.co.id

Abstract

The aims of this research are to analyze the power of fish-processor, evaluated by economic and non economic aspect, to analyze the performance of fish-processing by R/C ratio, to analyze the role of stakeholders in increasing fish-processor's income, and to formulate the strategy of empowerment for fish-processor.

Primary data populated from 109 respondents in South Cilacap Subdistrict. The analysis methods used are descriptive statistics, crosstab analysis, and analytical of process hierarchy.

The results of study indicate that the powers of fish-processor are still less, they have low level income with R/C ratio 1,03 up to 1,67. The roles of stakeholders toward coastal area community are still poor. Therefore, we need strategy to empower them by giving loan (credit), reviving the fish-processor's organization, and giving information and training about modern technical of fish-processing.

Keywords: the power of fish- processor; stakeholders; R/C ratio

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat pesisir pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara sosial, ekonomi, dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Persepsi demikian didasarkan pada hasil pengamatan langsung terhadap realitas kehidupan masyarakat pesisir atau melalui pemahaman terhadap hasil-hasil kajian akademis. Keterbelakangan sosial ekonomi pada masyarakat pesisir merupakan

hambatan potensial bagi mereka untuk mendorong dinamika pembangunan di wilayahnya. Akibatnya sering terjadi kelemahan *bargaining position* dengan pihak-pihak lain di luar kawasan pesisir, sehingga mereka kurang memiliki kemampuan mengembangkan kapasitas dirinya dan organisasi atau kelembagaan sosial yang dimiliki sebagai sarana *aktualisasi* dalam membangun wilayahnya (Kusnadi, 2006). Berkaitan dengan kesejahteraan

masyarakat pesisir, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mereka masih tertinggal antara lain keadaan sumberdaya alam yang semakin menipis, kurangnya budaya menabung dan mengelola keuangan keluarga, serta struktur ekonomi atau tata niaga yang belum *kondusif* bagi kemajuan dan kemakmuran masyarakat (Rokhmin Dahuri dan Rais Ginting, 2001).

Karakteristik sosial masyarakat pesisir di atas menjadi penghambat untuk mengembangkan kemampuan partisipasi mereka dalam pembangunan wilayah. Seiring dengan belum berfungsinya atau belum adanya kelembagaan sosial masyarakat maka upaya kolektif untuk mengelola potensi sumberdaya wilayah juga menjadi terhambat. Keadaan ini berpengaruh besar terhadap lambannya arus perubahan sosial ekonomi yang terjadi di kawasan pesisir, sehingga dinamika pembangunan wilayah menjadi terganggu.

Salah satu strategi yang dapat ditempuh dalam upaya membangun masyarakat pesisir agar potensi pembangunan dapat dikelola dengan baik adalah dengan membangun dan memperkuat kelembagaan sosial yang dimiliki atau yang ada pada masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM, dengan jalan memperluas wawasan pembangunan dan ketrampilan ekonomi masyarakat.

Diharapkan melalui strategi ini masyarakat secara kolektif mempunyai kemampuan optimal dalam membangun wilayahnya.

B. Tujuan Khusus

Dalam komunitas pesisir, terdapat semacam kesadaran bahwa memang kehidupan mereka sangat rentan, terutama dari segi pendapatan. Suatu saat mereka dapat memperoleh pendapatan yang besar, namun tidak jarang dalam beberapa kali penangkapan tidak mendapatkan hasil. Dalam kenyataan yang berkembang sampai saat ini pun, dukungan dari masyarakat, instansi pemerintah, dan pihak-pihak terkait masih belum sepenuhnya dalam hal pemberdayaan dan peningkatan pendapatan pengolah ikan. Terlihat bahwa sebagian besar pengolah ikan di Kabupaten Cilacap tidak tahu cara untuk memperoleh kredit usaha. Diperkuat lagi dengan pengakuan bahwa modal usaha mereka pun merupakan modal sendiri dan bukan berasal dari suatu lembaga keuangan (berdasarkan hasil *pra survai* terhadap pengolah ikan di lokasi penelitian).

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pemberdayaan yang tepat bagi masyarakat pesisir dengan fokus pada pengolah ikan di Kabupaten Cilacap. Dalam penelitian ini akan diidentifikasi tingkat keberdayaan pengolah ikan baik dari aspek

ekonomi maupun aspek non ekonomi, pola penerimaan dan pengeluaran usaha serta peran *stakeholders* dalam kegiatan usaha pengolahan ikan. Selanjutnya, penelitian ini akan merumuskan strategi peningkatan keberdayaan pengolah ikan yang tepat guna meningkatkan pendapatan mereka berdasarkan beberapa alternatif dan prioritas menurut beberapa pihak terkait yang dapat diterapkan di daerah penelitian dengan menggunakan *Analisis Hierarki Proses (AHP)*. Perumusan strategi pemberdayaan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam rangka memperbaiki usaha yang selanjutnya dapat memberikan *impuls* untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pengolah ikan.

C. Urgensi Penelitian

Pembangunan masyarakat pantai/pesisir tidak bisa lepas dari pembangunan desa pada umumnya. Strategi pada pembangunan masyarakat desa perlu diterapkan juga pada pembangunan masyarakat pesisir, yaitu membantu masyarakat untuk dapat membangun dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan mendasarkan pada pengembangan potensi alam lingkungan desa (Rokhmin Dahuri, dkk, 2001).

Kawasan pesisir sebagai daerah yang cukup potensial membuat kawasan ini pada umumnya sebagai tempat konsentrasi pemukiman penduduk. Berbagai persoalan sosial ekonomi muncul di kawasan ini sebagai *refleksi* dari banyaknya kegiatan manusia. Diantara masalah *krusial* yang ada adalah kemiskinan, baik secara struktural, kultural, maupun alamiah, terutama mereka yang menggantungkan diri pada pemanfaatan sumberdaya alam pesisir sebagai mata pencaharian. Kemiskinan sendiri erat kaitannya dengan ketidakberdayaan.

Rendahnya tingkat keberdayaan pengolah ikan sesungguhnya berakar pada minimnya sumberdaya manusia dalam menguasai teknologi pengolahan. Pelaku utama kegiatan usaha perikanan adalah pengolah dengan pendidikan terbatas, di mana sekitar 90 persen masyarakat pesisir hanya berpendidikan SD (Supriharyono, dkk, 2002) serta hanya mengandalkan fisik dan prasarana seadanya tanpa memperhatikan kualitas. Akibatnya tidak terjadi peningkatan pendapatan.

Menurut Widodo dan Suadi (2006), aspek SDM sangat dipengaruhi oleh lingkungan faktor ekonomi. Lingkungan faktor ekonomi meliputi beberapa aspek seperti demografi (umur, jenis kelamin, pola migrasi, dsb.), aspek budaya (sejarah, tradisi, hubungan masyarakat, dsb.),

aspek ekonomi (pendapatan dan pola pengeluaran), dan kelembagaan (kebijakan, pengambilan keputusan, partisipasi, dsb.).

Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan faktor penentu yang penting bagi upaya peningkatan daya saing perikanan nasional melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi, serta peningkatan nilai tambah dan mutu produk. Menurut Dahuri (2001), peningkatan sumberdaya manusia dapat dilakukan melalui program pemberdayaan sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Menurutnya program pemberdayaan mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat.

Perikanan laut di Indonesia sebagian besar merupakan perikanan rakyat, dan hanya sebagian kecil merupakan perikanan industri. Perikanan rakyat sendiri hingga saat ini masih bersifat tradisional, artinya pengolahan yang dilakukan belum banyak menerima atau menerapkan informasi dari luar yang lebih modern, bersifat turun temurun dan menggunakan peralatan yang sederhana. Untuk Jawa Tengah sendiri, pengolahan ikan pada umumnya masih bersifat tradisional, tidak terkecuali di Kabupaten Cilacap. Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Tengah tahun 2010, sebagian besar (lebih dari 60 persen) ikan segar hasil tangkapan nelayan

diolah menjadi ikan asin, ikan pindang, ikan asap, dan produk tradisional lainnya. Produk-produk tersebut menempati posisi penting dalam susunan menu makanan harian sebagai salah satu sumber protein hewani bagi sebagian masyarakat. Produk perikanan dalam bentuk olahan memiliki kelebihan dibandingkan dengan ikan yang masih segar, yaitu daya tahan lebih lama, jangkauan pemasaran lebih luas, serta harga produk yang lebih murah sehingga dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat. Mengingat bahwa ikan merupakan bahan makanan yang mudah busuk (*perishable food*), maka harus diimbangi dengan kegiatan pengawetan dan pengolahan ikan secara baik dan memenuhi standar kesehatan agar nanti hasilnya dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan rakyat banyak.

Dalam banyak kasus di Jawa Tengah sendiri, keterlibatan nelayan dan pengolah ikan yang berskala kecil menempati jumlah yang dominan dan mereka rata-rata melakukan kegiatan usaha berskala kecil serta memiliki tingkat kemandirian dan keberlanjutan usaha yang relatif rentan terhadap perubahan keadaan. Kabupaten Cilacap mempunyai potensi sumberdaya perikanan yang masih cukup besar, namun perilaku usaha pengolahan ikan mencerminkan tingkat keberdayaan usaha mereka. Tingkat keberdayaan dapat didekati

dari dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan non ekonomi (Indah Susilowati, dkk., 2004). Permasalahannya adalah seberapa besar tingkat keberdayaan pengolah ikan di Kabupaten Cilacap. Tingkat keberdayaan ini tidak lepas dari kinerja usaha dan peran serta *stakeholders* yang selanjutnya akan dirumuskan strategi pemberdayaan yang tepat sehingga dapat membawa usaha mereka ke arah yang lebih mandiri melalui peningkatan pendapatan.

D. Telaah Pustaka

1. Konsep Pemberdayaan

Pembangunan adalah proses alami mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu terwujudnya masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007). Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya konsumsi yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan. Pendapatan meningkat sebagai akibat hasil produksi yang semakin meningkat pula. Proses alami di atas dapat terlaksana jika asumsi-asumsi pembangunan yang ada, yaitu kesempatan kerja atau partisipasi termanfaatkan secara penuh (*full employment*), setiap orang memiliki kemampuan yang sama (*equal productivity*), dan masing-masing pelaku ekonomi bertindak rasional (*efficient*), dapat dipenuhi. Namun demikian, dalam realitas asumsi-asumsi di atas sangat sulit dipenuhi.

Pasar seringkali tidak mampu memanfaatkan tenaga kerja dan sumberdaya alam sedemikian rupa sehingga tak mampu berada pada kondisi *full employment*. Tingkat kemampuan dan produktivitas pelaku ekonomi juga sangat beragam. Kondisi di atas diperburuk oleh kenyataan bahwa tidak setiap pelaku ekonomi mendasarkan perilaku pasarnya atas pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan efisien. Dalam kondisi demikian, pasar atau ekonomi telah terdistorsi. Dalam jangka panjang hal tersebut akan melahirkan masalah-masalah pembangunan, seperti kesenjangan, pengangguran, dan akhirnya kemiskinan. Di tengah kondisi *distortif* tersebut, proses natural dalam pembangunan tidak dapat terjadi begitu saja. Proses natural harus diciptakan melalui *intervensi* pemerintah, dengan kebijakan-kebijakan yang akan mendorong terciptanya kondisi yang mendekati asumsi-asumsi di atas.

Dengan demikian, dalam pelaksanaan pembangunan nasional ada tiga pertanyaan dasar yang perlu dijawab. *Pertama*, pembangunan perlu diletakkan pada arah perubahan struktur. *Kedua*, pembangunan perlu diposisikan pada arah pemberdayaan masyarakat untuk menuntaskan masalah kesenjangan berupa pengangguran, kemiskinan, dan ketidakmerataan dengan memberikan

ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat banyak untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. *Ketiga*, pembangunan perlu ditempatkan pada arah koordinasi lintas sektor yang mencakup program pembangunan antar sektor, pembangunan antar daerah, dan pembangunan khusus. Dalam implementasinya, usaha untuk menjawab ketiga arah pembangunan itu harus dilaksanakan secara terpadu, terarah, dan sistematis. Pemberian ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat untuk berpartisipasi dapat bersinergi dengan upaya untuk menanggulangi masalah pengangguran, kemiskinan, dan ketidakmerataan. (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007). Konsep pemberdayaan (*empowerment*) muncul karena dua premis mayor, yakni kegagalan dan harapan (Friedmann,1992). Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sementara itu, harapan muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Kegagalan dan harapan bukanlah alat ukur dari hasil kerja ilmu-ilmu sosial, melainkan lebih merupakan cermin dari nilai-nilai normatif dan moral.

Kegagalan dan harapan akan terasa sangat nyata pada tingkat individu dan masyarakat. Pada tingkat yang lebih luas, yang dirasakan adalah gejala kegagalan dan harapan. Dengan demikian, “pemberdayaan masyarakat”, pada hakekatnya adalah nilai kolektif pemberdayaan individual (Friedmann, 1992).

Konsep *empowerment* sebagai konsep alternatif pembangunan pada intinya menekankan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Sebagai titik fokusnya adalah lokalitas sebab *civil society* akan merasa siap diberdayakan lewat isu-isu lokal. Namun, Friedmann juga mengingatkan bahwa adalah sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur di luar *civil society* diabaikan (Hall, 1995). Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat tidak sebatas ekonomi, namun juga secara politis sehingga pada akhirnya masyarakat akan mempunyai posisi tawar baik secara nasional maupun internasional (Friedmann, 1992). Konsep *empowerment* merupakan hasil kerja proses interaktif baik pada tataran ideologis maupun pada tataran implementasi. Pada tataran ideologis,

konsep pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep *top-down* dan *bottom-up*, antara *growth strategy* dan *people-centered strategy*. Pada tataran implementasi, interaksi akan terjadi melalui pertarungan antar otonomi (Friedmann, 1992). Konsep pemberdayaan sekaligus mengandung konteks pemihakan kepada lapisan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan (Mubyarto, 1997).

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*), dan tahap selanjutnya adalah pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat (*community-driven development*). Perlu dipahami arti dan makna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat serta inovatif, tentu memiliki keberdayaan yang tinggi. Selain nilai fisik di atas, ada juga nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti nilai kekeluargaan, kegotongroyongan, kejuangan, dan yang khas pada

masyarakat Indonesia, yaitu kebinekaan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (*survive*) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, namun juga secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi secara *harfiah* berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, dan kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep ini menyangkut masalah penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses ke pasar dan sumber-sumber informasi, serta ketrampilan manajemen. Agar demokrasi ekonomi dapat berjalan, aspirasi masyarakat yang tertampung harus diterjemahkan menjadi rumusan-rumusan kegiatan yang nyata. Untuk menerjemahkan

rumusan menjadi kegiatan nyata, negara mempunyai birokrasi. Birokrasi ini harus dapat berjalan efektif, artinya mampu menjabarkan dan melaksanakan rumusan-rumusan kebijaksanaan negara (*public policies*) dengan baik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Dalam konteks Indonesia, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan iklim yang kondusif.

2. Studi Pendahuluan

Beberapa penelitian tentang masyarakat pesisir menunjukkan bahwa mereka pada umumnya dalam kondisi kurang berdaya (*powerless*) dan memerlukan peran serta aktif dari pihak-pihak terkait (*stakeholders*) untuk membantu mereka agar lebih mandiri (berdaya) dalam melakukan kegiatan usahanya. Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada keragaman sampel, lokasi penelitian, dan model pendekatan yang digunakan. Penelitian oleh Indah Susilowati, dkk. (2004) tentang pemberdayaan masyarakat pesisir (nelayan pengolah) di Pekalongan menunjukkan bahwa kondisi pengolah ikan dengan skala usaha mikro/kecil dan menengah masih relatif kurang berdaya dalam memperoleh akses ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Eva Meilian Sari (2006) terhadap

nelayan dan pengolah ikan di Kota Tegal menunjukkan keadaan serupa bahwa sebagian besar nelayan dan pengolah ikan di daerah penelitian adalah berskala usaha kecil/tradisional dan masih kurang berdaya. Sementara itu, Rifka Nur Anisah (2007) yang melakukan penelitian terhadap pengolah ikan di Kota Tegal menemukan hal yang tidak berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu bahwa keadaan usaha mereka memiliki tingkat keberdayaan yang masih rendah. Penelitian terbaru oleh Mayanggita Kirana (2008) dengan judul: “Analisis Tingkat Keberdayaan Nelayan dan Pengolah Ikan Di Pesisir Utara dan Pesisir Selatan Jawa Tengah Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Studi: Kabupaten Rembang dan Kabupaten Cilacap)”, menyebutkan bahwa nelayan dan pengolah ikan di daerah penelitian memiliki tingkat keberdayaan yang rendah sehingga peran sertanya dalam mendukung ketahanan pangan menjadi *fragile*.

Dibandingkan pantai utara yang lautnya relatif tenang, pantai selatan memiliki laut yang lebih ganas, lebih luas dan terbuka, sehingga diperkirakan potensi sumberdaya perikanan yang tersedia lebih besar daripada pantai utara (Ary Wahyono, 2001). Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2010, di Pesisir Selatan Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap

memberikan kontribusi volume produksi perikanan laut paling tinggi, yaitu sebesar 14.667,43 ton (86,24%) dengan nilai produksi Rp 201.291.942,41 (86,83%). Melihat keadaan tersebut, maka Cilacap memiliki andil dalam potensi perikanan laut di Jawa Tengah sebagai peluang yang layak untuk terus dikembangkan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumberdaya ikan. Selain itu, Kabupaten Cilacap memiliki 2.427 unit rumah tangga perikanan laut (jumlah tertinggi di antara kabupaten-kabupaten di Pesisir Selatan). Banyaknya rumah tangga perikanan laut diharapkan mampu produktif sehingga berdampak pada volume produksi perikanan yang juga tinggi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

a. *Data primer*

Data yang dicatat dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumbernya. Data ini diambil melalui survai dengan wawancara langsung menggunakan daftar pertanyaan terhadap responden, yaitu pengolah ikan berkenaan dengan variabel penelitian.

b. *Data sekunder*

Data yang dicatat dan dikumpulkan oleh pihak lain,

bukan oleh peneliti. Data ini diperoleh dari instansi/lembaga/dinas yang terkait dengan masalah penelitian.

2. Penentuan Sampel

Teknik pengambilan sampel bagi pengolah ikan dalam penelitian ini adalah

multistage sampling, dengan tahapan sebagai berikut:

Tahap I

Menentukan wilayah sentra produksi pengolahan ikan sebagai tempat penentuan sampel. Berdasarkan jumlah produksi ikan olahan yang dihasilkan oleh rumah tangga pengolah ikan sebagian besar berlokasi di Kecamatan Cilacap Selatan (*cluster sampling*), maka kecamatan ini diambil sebagai tempat penelitian. Kriteria tempat pengambilan sampel yang didasari atas jumlah produksi ikan olahan terbesar menjadi landasan pemilihan tempat pengambilan sampel.

Tahap II

Menentukan pengolah ikan yang akan diambil sebagai sampel. Berdasarkan jenis usaha pengolahan ikan yang dominan dilakukan oleh rumah tangga pengolah di wilayah sentra produksi ikan olahan adalah jenis usaha pengasinan,

pemindangan, pemanggangan atau pengasapan, pengolahan ikan segar, dan terasi yang berada di Kecamatan Cilacap Selatan (*purposive sampling*). Maka pengolah ikan asin, pengolah ikan pindang, pengolah ikan panggang, pengolah ikan segar, dan pembuat terasi diambil sebagai sampel responden. Kriteria sampel yang didasarkan atas jenis usaha pengolahan ikan yang ada di sentra produksi ikan olahan menjadi landasan pemilihan sampel.

Tahap III

Menentukan jumlah sampel. Pengambilan sampel dilakukan secara terkuota (*quoted sampling*), yaitu sampel kecil ($n=30$) untuk responden pengolah hasil perikanan di sentra produksi ikan olahan Kecamatan Cilacap Selatan dengan distribusi sampel masing-masing usaha pengolahan. Untuk jenis usaha pengolahan hasil perikanan yang sub populasinya berjumlah lebih dari 30 unit usaha, maka sampel yang diambil sebanyak $n=30$, sedangkan bagi jenis usaha pengolahan ikan yang sub populasinya berjumlah kurang dari 30 unit usaha, maka sampel yang diambil adalah

sub populasi seluruhnya. Data responden ditelusuri dengan cara *door to door*.

3. Metode Analisis

a. Metode Tabulasi Silang (*crosstab*)

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengolah ikan digunakan tabulasi silang antara indikator-indikator tingkat keberhasilan seperti akses usaha (kredit), akses pasar (informasi permintaan dan penawaran), dan akses teknologi dengan jenis usaha responden. Berdasarkan tabulasi silang tersebut diperoleh hasil yang diukur *by rule of thumb*. Apabila kurang dari 50 persen dari total responden pengolah ikan untuk mendapatkan akses usaha (kredit), akses pasar (informasi permintaan dan penawaran), dan akses teknologi (perbaikan teknik pengolahan) berasal dari diri sendiri, maka dapat dikatakan tingkat keberdayaannya rendah. Sebaliknya, jika lebih dari 50 persen dari total responden menjawab telah memanfaatkan sumber atau pihak lain untuk mendapatkan akses usaha, pasar, dan teknologi, maka dapat dikatakan tingkat keberdayaannya tinggi. Analisis *crosstab* ini juga digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengolah

ikan dari indikator kemampuan lobi antara (1) punya tidaknya responden atas akses dengan kenalan (*stakeholders*), (2) pernah minta tolong atau tidak dengan *stakeholders*, dan (3) berhasil atau tidak dalam meminta pertolongan tersebut. Apabila responden pernah meminta pertolongan maka dianggap responden sudah pernah melakukan pendekatan atau lobi dan apabila permintaan pertolongan tersebut berhasil maka berarti kemampuan lobi responden tinggi. Hal ini merupakan bentuk dari representasi diri dari responden atau dapat dikatakan bahwa tingkat keberdayaan mereka sudah tinggi.

b. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat kuantitatif. Pendekatan ini berangkat dari data yang diproses menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan (SPSS dan Mason *et al*, 1999). Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui indikator sosial ekonomi seperti profil responden yang mencakup umur, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, dan lain-lain (Indah Susilowati, 1997). Analisis ini juga dipakai untuk mengetahui

gambaran umum dan kondisi usaha pengolah ikan di daerah penelitian yang meliputi jumlah produksi, penerimaan total dan biaya total, serta keuntungan yang diperoleh. Sementara itu, untuk mengetahui peran *stakeholders* dalam membantu dan mendukung usaha masyarakat pesisir menurut penilaian responden juga digunakan analisis secara *deskriptif* dengan menggunakan *skala konvensional* (1-10), berdasarkan nilai rata-ratanya yang dikategorikan sebagai berikut:

- a. Skala 1-5 menunjukkan nilai rendah
- b. Skala 5-7 menunjukkan nilai sedang atau biasa-biasa saja
- c. Skala 7-8 menunjukkan nilai cukup
- d. Skala 8-10 menunjukkan nilai tinggi atau bagus

c. Analisis Hierarki Proses

Analisis ini digunakan untuk merumuskan strategi pemberdayaan yang tepat yang akan diterapkan bagi masyarakat pesisir (pengolah ikan) di daerah penelitian.

F. Hasil Penelitian

1. Tingkat Keberdayaan Pengolah Ikan

Berdasarkan hasil pengumpulan data terhadap responden

di daerah penelitian, secara umum tingkat keberdayaan pengolah ikan di Kabupaten Cilacap masih tergolong rendah, baik untuk aspek ekonomi maupun aspek non ekonomi. Melihat keadaan tersebut, diperlukan suatu strategi pemberdayaan yang tepat untuk membuat mereka lebih berdaya.

a. Aspek Ekonomi

1) Akses Usaha : Kredit

Akses usaha, dalam hal ini adalah kemampuan untuk mendapatkan bantuan pinjaman (kredit) dari lembaga keuangan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat keberdayaan masyarakat. Berdasarkan survai di lapangan, keberdayaan masyarakat pesisir (responden pengolah ikan) dalam memperoleh kredit masih sangat terbatas. Sebanyak 59 dari 109 responden pengolah ikan (54,13 persen) mengaku belum/tidak memanfaatkan kredit, meskipun mereka masih memerlukan tambahan modal untuk menjalankan usaha. Hal ini karena pada umumnya mereka masih takut atau tidak mau repot berurusan dengan bank atau lembaga keuangan lainnya.

Para responden yang mendapatkan bantuan kredit merasa bahwa bantuan kredit yang diterima sudah dapat membantu dalam mencukupi kebutuhan modal untuk melakukan pengolahan ikan, namun dengan jangka waktu pengembalian antara 1

tahun hingga 3 tahun dan suku bunga yang relatif tinggi (sebesar 12 persen per tahun untuk kredit dari bank) merupakan hal yang membuat para responden peminjam kredit menganggap bantuan tersebut belum dapat membantu dan meringankan beban mereka secara penuh.

Tingkat keberdayaan yang rendah dari responden antara lain disebabkan oleh : (1) tidak berani mengaktualisasikan atau merepresentasikan diri atau kelompok melalui berbagai prestasi dan ide-ide cemerlang ; (2) merasa tidak/belum perlu melakukan upaya peningkatan usaha (seperti: membuat inovasi produk, inovasi teknik pengolahan, mencari informasi pasar, dan lain-lain) ; dan (3) secara eksternal, belum adanya kepercayaan dari kreditor terhadap usaha mereka yang berskala kecil dan masih bersifat tradisional.

2) Akses Pasar : Informasi Penawaran dan Permintaan

Tingkat keberdayaan responden pengolah ikan dalam memanfaatkan akses informasi penawaran (*supply*) atas produk ikan yang diolah, sebagian besar diperoleh melalui konsumen. Sebanyak 42 dari 109 (38,53 persen) diperoleh melalui konsumen untuk informasi penawaran produknya. Selain itu, informasi penawaran juga diperoleh atas inisiatif sendiri, mekanisme pasar, sesama pengolah, dan survai.

Sedangkan untuk akses informasi permintaan diketahui bahwa sebagian besar responden di daerah penelitian memperoleh informasi tentang produk yang diminta dari pengamatan di pasar sebanyak 34 (31,19 persen), dari konsumen langsung sebanyak 66 (60,55 persen), dari mencari tahu sendiri sebanyak 4 (3,67 persen), dan dari sesama pengolah sebanyak 5 (4,59 persen). Sebagai contoh, untuk usaha pengolahan ikan segar, mereka mendapatkan informasi permintaan ikan segar dari pengusaha yang mengolah kembali ikan segar tersebut, yaitu usaha pengalengan ikan.

3) Akses Teknologi

Salah satu hambatan yang dihadapi dalam pengembangan usaha pengolahan ikan adalah di bidang teknologi. Aspek teknologi menyangkut cara-cara dalam usaha pengolahan ikan, apakah dilakukan secara turun-temurun (bersifat tradisional), dilakukan dengan cara sendiri, atau teknik yang berasal dari buku-buku atau penyuluhan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa teknik pengolahan ikan yang mereka lakukan adalah secara turun-temurun. Sebanyak 61 dari 109 responden (55,96 persen) masih menerapkan teknik pengolahan secara turun-temurun hingga sekarang. Hanya sebagian kecil saja responden yang telah menerapkan teknik pengolahan ikan dari penyuluhan atau buku, yaitu

sebanyak 20 responden atau sebesar 18,35 persen.

b. Aspek Non Ekonomi

1) Keputusan Usaha

Keputusan dalam melakukan usaha merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat keberdayaan dari aspek non ekonomi. Indikator ini mencakup apakah responden dalam melakukan usaha, yaitu menjadi pengolah ikan berdasarkan keputusan diri sendiri ataukah berdasarkan pertimbangan keluarga atau teman.

Survei di lapangan terhadap responden pengolah ikan menunjukkan bahwa dari aspek keputusan usaha tingkat keberdayaan usaha mereka masih rendah, sebagian besar responden, yaitu 67,89 persen menjawab mereka sendiri yang mengambil keputusan dalam berusaha. Sedangkan sisanya mempertimbangkan pendapat keluarga atau teman dalam mengambil keputusan usaha.

2) Kemampuan Melakukan *Lobby*

Indikator lain untuk melihat tingkat keberdayaan dari aspek non ekonomi adalah kemampuan melakukan *lobby* dengan *stakeholders*, yaitu pemerintah, koperasi, lembaga keuangan, tokoh masyarakat, pengusaha, LSM, dan perguruan tinggi. Diharapkan dengan adanya *lobby* dengan *stakeholders* dapat membantu meningkatkan usaha. Terdapat tiga pendekatan dalam

melihat kemampuan *lobbying* responden (Indah Susilowati *et al.*, 2004) :

- 1) Punya atau tidaknya responden atas akses dengan seseorang (kenalan atau famili) di pemerintahan, KUD, tokoh masyarakat, atau pejabat, lembaga keuangan, LSM, pengusaha, ataupun perguruan tinggi.
- 2) Pernah minta tolong atau tidak dengan para pemangku jabatan (*stakeholders*). Jika pernah minta pertolongan maka dianggap responden sudah pernah melakukan pendekatan atau *lobby*.
- 3) Jika permintaan pertolongan tadi berhasil, maka dapat digunakan sebagai indikasi bahwa intensitas *lobby*-nya tinggi.

Berdasarkan evaluasi dengan menggunakan ketiga pendekatan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa responden pengasin dan pemindang ikan memiliki hubungan yang relatif lebih luas atau menunjukkan kemampuan *lobby* yang lebih baik, diikuti dengan responden pengolah terasi, ikan segar, dan pemanggang. Hal ini karena kelompok pengasin dan pemindang memiliki pengalaman usaha yang lebih lama dan skala usaha yang lebih besar jika dibandingkan dengan pengolah ikan lainnya. Kemampuan melakukan *lobby* kepada *stakeholders* sangat penting bagi pengolah ikan.

Berdasarkan survai diketahui bahwa responden pengolah ikan memiliki tingkat keberdayaan yang relatif rendah karena sebagian besar responden (75,23 persen) cenderung tidak melakukan usaha apapun untuk menunjukkan eksistensi usaha mereka dan berani untuk melakukan pendekatan dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan usaha mereka. Hanya sebagian kecil responden saja yang berani merepresentasikan diri maupun kelompoknya di hadapan suatu forum seperti mengikuti berbagai pelatihan dan penyuluhan ataupun lomba meskipun tidak memperoleh juara.

2. Kinerja Usaha Pengolahan Ikan

Salah satu indikator untuk melihat kinerja usaha dalam kegiatan produksi adalah dengan membandingkan antara penerimaan usaha dengan pengeluaran usaha (*revenue and cost ratio*). Kinerja usaha dikatakan efisien jika nilai *R/C ratio* lebih besar daripada satu (Mulyadi, 2005). Berdasarkan survai di lapangan terhadap responden pengolah ikan, diperoleh hasil bahwa kinerja usaha dari kegiatan produksi yang mereka lakukan sudah cukup efisien. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *R/C ratio* yang lebih besar daripada satu untuk semua jenis usaha responden. Pengolah ikan panggang memiliki *R/C ratio* paling tinggi, sebesar 1,67 dan *R/C ratio* terendah

dimiliki oleh pengolah ikan segar, sebesar 1,03.

Berdasarkan wawancara dengan responden pengolah ikan diketahui bahwa pengolah ikan segar mempunyai *omset* usaha paling besar, yaitu rata-rata 4.957,03 kg/hari, kemudian berturut-turut adalah pengolah ikan pindang (2.457,92 kg/hari), pengolah ikan asin (625,34 kg/hari), pengolah ikan panggang (310,63 kg/hari), dan pembuat terasi (172,27 kg/hari). Sedangkan untuk rata-rata produksi dan jenis ikan yang diolah dari masing-masing pengolah ikan relatif bervariasi tergantung pada ketersediaan dan keterjangkauan harga ikan di TPI terdekat.

Struktur pengeluaran usaha yang paling besar adalah untuk menutup biaya variabel (sekitar 99 persen) untuk semua jenis usaha pengolahan ikan dan hanya satu persen saja yang digunakan untuk menutup biaya tetap (*depresiasi*). Biaya variabel yang dikeluarkan sebagian besar adalah untuk biaya bahan baku ikan (rata-rata sebesar 85,4 persen). Jenis usaha yang paling banyak mengeluarkan biaya variabel adalah pengolahan ikan pindang dan ikan segar, yaitu 99,9 persen dari total biaya. Sedangkan biaya tetap untuk usaha pengolahan ikan yang paling besar adalah ikan asin, yaitu 2,11 persen dari total biaya, kemudian berturut-turut biaya tetap pada

pengolahan ikan panggang, pembuatan terasi, ikan pindang, dan ikan segar.

Untuk produktivitas kerja, diketahui bahwa tenaga kerja pada pengolahan ikan segar memiliki produktivitas paling tinggi karena mampu menghasilkan jumlah produk paling banyak, yaitu 619 kg/hari/orang dengan proses pengolahan relatif singkat dan hari kerja dalam sebulan lebih panjang dibandingkan jenis usaha pengolahan ikan lainnya sehingga dalam sehari dapat dihasilkan produk yang lebih banyak.

3. Peran *Stakeholders* Dalam Meningkatkan Usaha Pengolah Ikan Di Kabupaten Cilacap

Stakeholders dapat dianggap sebagai salah satu pihak yang seharusnya dapat membantu memberdayakan pengolah ikan. *Stakeholders* dalam hal ini meliputi pemerintah, pebisnis, perguruan tinggi/LSM, KUD, dan masyarakat. Penilaian menggunakan skala konvensional 1 – 10, di mana responden akan memberikan angka yang tinggi untuk peran *stakeholders* yang menurut penilaian mereka juga besar.

Berdasarkan penilaian responden, nampak bahwa peran yang paling menonjol dalam setiap kegiatan usaha pengolah ikan mulai dari proses pengadaan faktor produksi hingga distribusi dan yang lainnya adalah peran dari pebisnis. Sedangkan peran

dari *stakeholders* yang lain dinilai kurang memadai.

Aktivitas usaha yang didominasi oleh peran swasta (pebisnis) adalah pada pengadaan faktor produksi, distribusi, akses pasar, dan *networking*. Pengadaan modal oleh swasta merupakan salah satu hal yang disorot oleh responden, dimana dianggap oleh mereka bahwa dalam menjalankan usaha banyak berhubungan dengan pihak swasta atau pengusaha.

Sebagian besar responden juga menilai bahwa pemerintah juga memiliki peranan yang besar dalam pengadaan sarana dan prasarana serta dalam inovasi teknologi jika dibandingkan dengan *stakeholders* lainnya. Beberapa tahun terakhir ini, pemerintah membangun banyak fasilitas di TPI yang diharapkan dapat membantu kelancaran usaha mereka. Pemerintah melakukan renovasi terhadap TPI PPNC dan beberapa TPI lain serta saat ini sudah tersedia sebuah pasar ikan higienis di Kecamatan Cilacap Selatan dan adanya bimbingan teknologi (bintek) bagi pengolah ikan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pebisnis dan pemerintah mempunyai peran yang relatif besar dalam meningkatkan usaha pengolah ikan di daerah penelitian. Sementara, peran dari *stakeholders* lain dianggap kurang memadai. Secara umum, peran *stakeholders* berdasarkan

penilaian responden masih rendah karena nilai rata-rata untuk tiap aktivitas usaha di bawah 5).

4. Perumusan Strategi Pemberdayaan Untuk Pengolah Ikan Melalui Analisis Hierarki Proses (AHP)

Hasil survai menunjukkan bahwa tingkat keberdayaan pengolah ikan di daerah penelitian masih rendah, baik untuk aspek ekonomi maupun aspek non ekonomi. Keadaan ini juga diperkuat oleh fakta bahwa pendapatan mereka yang hanya sedikit lebih besar dibandingkan biaya produksi serta kurangnya peran *stakeholders* dalam upaya meningkatkan usaha mereka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perlu dirumuskan strategi pemberdayaan yang tepat guna meningkatkan tingkat keberdayaan pengolah ikan yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan tingkat pendapatan mereka. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui prioritas dalam peningkatan keberdayaan pengolah ikan dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pemberian kredit dan bantuan modal tanpa agunan oleh lembaga keuangan di mana kredit diberikan dengan melihat kelayakan usaha serta jumlah pembayaran angsuran tidak ditentukan secara bulanan, namun berdasarkan siklus

- pendapatan pengolah ikan sebagai wujud pembukaan akses pengolah ikan terhadap lembaga keuangan sekaligus mengurangi ketergantungan mereka terhadap tengkulak (0,275).
- b. Pembentukan/pembaharuan organisasi atau kelompok pengolah ikan agar mampu menampung segala permasalahan krusial yang dihadapi oleh pengolah ikan (0,192).
 - c. Penyuluhan, bimbingan, konsultasi, dan pelatihan mengenai teknik produksi pengolahan ikan dan diversifikasi usaha dalam rangka peningkatan usaha agar produk olahan yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi, yaitu berupa metode pengolahan yang lebih higienis dan bermutu baik dengan teknologi yang lebih modern sehingga mampu menciptakan inovasi produk (0,129).
 - d. Pemberian bantuan pengadaan teknologi pengolahan secara kredit bergulir sehingga pemilikan peralatan pengolahan bersifat kolektif yang dapat dirasakan oleh kelompok pengolah ikan lain (0,101).
 - e. Pendirian proyek percontohan sebagai usaha binaan pengolahan produk perikanan (0,089).
 - f. Penyuluhan, bimbingan, konsultasi, dan pelatihan mengenai bentuk kemasan, metode pengemasan produk, dan mekanisme pemasaran yang efisien dan efektif sehingga produk mampu bersaing di pasar (0,080).
 - g. Pengadaan kegiatan yang bermanfaat bagi pengolah ikan untuk merepresentasikan usaha mereka sebagai diri sendiri maupun kelompok di suatu forum seperti melalui pameran dan bazaar produk olahan ikan, melalui lomba prestasi, dan sebagainya agar *networking* mereka menjadi lebih luas dan produk mereka dikenal (0,053).
 - h. Peningkatan peran KUD sebagai penyedia kebutuhan sehari-hari pengolah ikan dalam melakukan kegiatan usaha dan mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak (0,042).
 - i. Bimbingan manajemen keuangan usaha secara sederhana dalam bentuk administrasi pembukuan keuangan usaha dalam rangka transparansi pendapatan dan laba setiap hari, mingguan, maupun bulanan (0,038).
 - j. Penyuluhan kepada masyarakat agar gemar makan ikan karena kandungan gizinya yang sangat baik bagi kesehatan tubuh manusia (0,031).
- ### G. Kesimpulan
1. Tingkat keberdayaan pengolah ikan di Kabupaten Cilacap masih rendah baik untuk aspek ekonomi maupun aspek non ekonomi.

2. Untuk aspek ekonomi: kemampuan akses usaha responden sebesar 45,87 persen yang pernah mendapatkan bantuan kredit. Sedangkan dari akses informasi pasar sebesar 21,1 persen responden yang memanfaatkan mekanisme pasar untuk informasi penawaran produknya dan sebesar 31,19 persen responden melakukan pengamatan di pasar untuk permintaan produknya. Sementara itu, untuk akses teknologi pengolahan ikan, hanya sebesar 18,35 persen responden yang sudah menerapkan teknik pengolahan ikan dari sumber lain (penyuluhan dan buku).
3. Ditinjau dari aspek budaya, sebesar 32,11 persen responden mengaku bahwa keputusan usaha yang mereka lakukan berasal dari keluarga atau teman. Sedangkan dari aspek politik dan sosial, sebesar 24,77 persen responden yang berani untuk melakukan pendekatan dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan usaha mereka.
4. Untuk usaha pengolahan ikan, diketahui bahwa pengolah ikan segar mempunyai *omset* usaha paling besar, yaitu rata-rata 4.957,03 kg/hari, kemudian berturut-turut adalah pengolah ikan pindang (2.457,92 kg/hari), pengolah ikan asin (625,34 kg/hari), pengolah ikan panggang (310,63 kg/hari), dan pembuat terasi (172,27 kg/hari). Adapun struktur rasio penerimaan terhadap pengeluaran usaha untuk masing-masing pengolah ikan adalah: pengolah ikan asin 1,38; pengolah ikan pindang 1,10; pengolah ikan panggang 1,67; pengolah ikan segar 1,03; dan pembuat terasi 1,50.
5. Peran *stakeholders* dalam membantu meningkatkan usaha dinilai oleh responden masih kurang (skor rata-rata kurang dari 5). Dapat dikatakan bahwa pebisnis cukup memegang peran dalam pengadaan faktor produksi, akses usaha, dan *networking* kepada responden. Sedangkan peran pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana usaha dinilai sudah cukup baik.
4. Prioritas kebijakan yang dapat ditempuh dalam rangka meningkatkan keberdayaan pengolah ikan adalah melalui pemberian kredit dan bantuan modal tanpa agunan, pembentukan organisasi kelompok masyarakat pesisir, serta penyuluhan dan pelatihan terkait dengan teknik produksi dan aspek lainnya.

H. Rekomendasi

Guna meningkatkan usaha pengolah ikan di daerah penelitian sehingga diharapkan tingkat keberdayaan mereka pun bisa ditingkatkan, maka

dapat ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan peran dan kontribusi *stakeholders* dalam rangka meningkatkan usaha responden pengolah ikan yang sebagian besar belum mampu untuk melakukan aktualisasi diri ataupun kelompoknya dan kemampuan *lobby* mereka dengan pihak-pihak yang terkait dengan usaha mereka juga masih sangat terbatas.
2. Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir dapat diterapkan di daerah penelitian secara efektif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Beberapa agenda utama yang diperlukan untuk merealisasikan peningkatan keberdayaan pengolah ikan adalah melalui (1) pemberian bantuan

kredit tanpa agunan dan besarnya angsuran disesuaikan dengan siklus pendapatan masyarakat; (2) pembentukan organisasi pengolah ikan sebagai wadah yang beranggotakan mereka sendiri baik yang sebelumnya pernah didirikan tapi tidak berkembang maupun yang benar-benar belum terbentuk agar mampu menampung segala permasalahan *krusial* yang dihadapi sekaligus sebagai wadah yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut; (3) sosialisasi melalui penyuluhan, pelatihan, dan proyek percontohan (usaha binaan) untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan sehingga dapat bersaing di pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, E. dan Liviawaty, E. 2005. **Pengawetan dan Pengolahan Ikan**. Kanisius, Yogyakarta.
- Ary Wahyono, 2001. **Pemberdayaan Masyarakat Nelayan**. Media Pressindo, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2008. **Cilacap Dalam Angka**. BPS Kabupaten Cilacap.
- Badan Pusat Statistik, 2008. **Statistik Perikanan Tangkap Jawa Tengah**. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Riset Kelautan dan Perikanan, 2005. **Ikan Pindang**. Dinas Perikanan dan Kelautan, Jakarta. (<http://www.brkp.dkp.go.id>).
- Dinas Perikanan dan Kelautan. 2003. **Ada Apa dengan Ikan Asap**. Jakarta, (<http://www.brkp.dkp.go.id>).
- Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah. 2007. **Statistik Perikanan Tangkap**. Jawa Tengah, Semarang.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cilacap. 2007. **Profil Perikanan Kabupaten Cilacap**, Cilacap.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2001. **Inventarisasi Jenis dan Jumlah Produk Olah Hasil Perikanan Skala Kecil Di Indonesia**,

- Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Eva Meilian Sari, 2006. Analisis Tingkat Keberdayaan Nelayan dan Pengolah Ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelurahan Tegalsari Kota Tegal untuk Meningkatkan Pendapatan. **Skripsi** Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Heruwati, E.S. 2002. **Pengolahan Ikan Secara Tradisional**. Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Hidayat, S. dan Samsulbahri, D. 2001. **Pemberdayaan Ekonomi Rakyat**. PT. Pustaka Quantum, Jakarta.
- Indah Susilowati, Agung Sudaryono, Tri Winarni A. 2004. **Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi-UMKMK) dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah**. Laporan Penelitian RUKK Tahun I, Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, Semarang.
- Irawan, A., 1997. **Pengawetan Ikan dan Hasil Perikanan**. CV. Aneka Solo.
- Iswahyudi, 2001. **Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**. Majalah Kelautan dan Perikanan. Departemen Kelautan dan Perikanan. CV. Tiga Putra Jaya, Jakarta.
- Johanes Widodo dan Suadi, 2006. **Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut**. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kusnadi, 2007. **Strategi Hidup Masyarakat Nelayan**. LKiS Yogyakarta.
- Martasuganda S., 2003. **Teknologi Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Mason, Robert D, Douglas A. Lind, William G. Maschall, 1999. **Statistical Technique in Business and Economics**. McGraw Hill International Edition, London.
- Moeljanto, 1992. **Pengolahan Hasil Perikanan, Home Industri Usaha Pengolahan dan Mengkomersialkan Hasil Sampingannya**, CV. Aneka, Solo.
- Mubyarto (ed), 1997. **Kisah-kisah IDT, Penuturan 100 Sarjana Pendamping**, cetakan pertama, Aditya Media, Yogyakarta.
- Mulyadi, 2005. **Ekonomi Kelautan**. Rajawali Pers, Jakarta.
- Nicholson, Walter., 2002. **Microeconomics Intermediate**. Erlangga, Jakarta.
- Nikijuluw, 2005, **Politik Ekonomi Perikanan**. Feraco, Jakarta.
- Randy R. Wrihatnolo dan Riant N. Dwidjowijoto, 2007. **Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat**. PT. ElexMedia Komputindo, Jakarta.
- Rifka Nur Anisah, 2007. Analisis Tingkat Keberdayaan Pengolah Ikan yang Berorientasi Pasar (Studi Empiris di Kota Tegal). **Tesis** Magister Sumber Daya Pantai Fakultas Perikanan Universitas Diponegoro, Semarang.

- Rokhmin Dahuri, Rais Ginting, Sitepu, 2001. **Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu**. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Rokhmin Dahuri, 2004. **Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan**. LISPI, Jakarta.
- Saaty, T.L., 1993. **Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin** (terjemahan: Liana Setiono). PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Santoso, H.B., 2006. **Ikan Pindang**. Kanisius, Yogyakarta.
- Supriharyono, 2002. **Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah Pesisir Tropis**. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Surochiem, 2001. **Dimensi-dimensi Penting Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Partisipasi pada Masyarakat Pesisir**. Jurnal Neptunus Vol. 8 No. 1, Maret 2001: 50-56, Surabaya.
- Sutrisno, 1995. **Nelayan dan Kemiskinan**. Rajawali, Jakarta.
- Tridoyo Kusumastanto, 2001. **Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**. Majalah Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Wibowo, S., 1999. **Industri Pengasapan Ikan**. PT. Panebar Swadaya, Jakarta.